

KEPENTINGAN STRATEGIS AMERIKA SERIKAT DI ASIA-PASIFIK*

Poltak Partogi Nainggolan**

Abstract

Since the end of 2011, US changing policy on Asia-Pacific can be more obviously seen. President Obama, for example, has stated that US will permanently exist in the region after for long time focused its policy on Middle East and Europe. This article is part of a research report on the changing paradigm of US security policy in the Asia-Pacific region. The article is developed from a descriptive analytical research which applies a qualitative method. Data gathering is conducted by combining library studies and open in-depth interviews. Findings reveal the relevance between US national interest and the changing orientation of US security policy in Asia-Pacific.

Keywords: *US, Indonesia, PRC, security interest, strategic interest, Asia-Pacific*

Abstrak

Sejak akhir 2011, perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) di kawasan Asia Pasifik tampak semakin jelas. Presiden Obama telah menyatakan secara tegas kehadiran kembali AS di kawasan ini setelah selama ini lebih menitikberatkan kebijakan AS di Timur-Tengah dan Eropa. Tulisan ini bagian dari hasil penelitian mengenai perubahan orientasi kebijakan keamanan AS di kawasan. Penelitian bersifat deskriptis-analitis, dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Temuan penelitian memperlihatkan relevansi kepentingan nasional AS dan perubahan orientasi kebijakan keamanannya di Asia Pasifik.

Kata kunci: AS, Indonesia, RRC, kebijakan keamanan, paradigma keamanan, kepentingan strategis, Asia-Pasifik

* Tulisan ini merupakan bagian dari hasil penelitian mengenai Perubahan Strategi Keamanan Amerika Serikat di Asia Pasifik dan Implikasinya terhadap Persepsi Keamanan Indonesia, yang dilakukan pada tahun 2012. Penulis menyampaikan terima kasih pada Dr. Ganewati Wuryandari, MA dari LIPI yang telah memberikan kritik dan masukan untuk perbaikan tulisan ini.

** Penulis adalah peneliti utama IV/e bidang masalah-masalah hubungan internasional.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Untuk pertama kalinya seorang Presiden AS mengunjungi wilayah Darwin, Northern Territory, Australia. Dalam kunjungan yang dilakukan Presiden Barack Obama pada 15 November 2011 itu, diumumkan keinginan AS meningkatkan keberadaan militernya di wilayah Asia-Pasifik. Bersama dengan PM Australia, Julia Gillard, Obama telah mengumumkan penempatan 2.500 personil marinir AS di pangkalan militer Australia di Darwin, dengan menggunakan barak Robertson.¹ Pasukan marinir ini diharapkan akan bertindak cepat atas masalah-masalah kemanusiaan dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Dengan demikian, AS dapat meningkatkan kesiagaan untuk menggelar operasi tanggap darurat bencana alam di kawasan ini.

Pasukan dikirimkan secara bertahap, dengan sebanyak 200-250 marinir AS mulai ditempatkan pada pertengahan 2012. Mereka akan menjalankan tugas selama 6 bulan dengan sistem rotasi. Pasukan marinir AS ini akan bergerak lebih sering dari dan keluar Northern Territory. Dalam waktu enam tahun direncanakan jumlahnya akan meningkat menjadi 2.500 personil.

Walaupun dengan sistem rotasi, dilaporkan gelar pasukan marinir AS di Darwin tersebut dilakukan secara permanen. Kehadiran secara permanen ini sebenarnya telah dipertimbangkan beberapa tahun sebelumnya ketika Washington mulai memperkuat komando Pasifiknya.² Gelar pasukan AS secara permanen di Australia ini melengkapi pangkalan mata-mata *Joint Defence Facility* di Pine Gap dekat Alice Springs. Selain barak Robertson di Darwin yang sudah ada, lokasi-lokasi lain seperti di Perth di barat Australia mungkin juga akan digunakan oleh pasukan AS. Kehadiran militer AS di Australia akan menambah jumlah pasukan marinir negeri itu yang sudah ada sejak lama di Okinawa, Jepang, dan di Guam, sebagai pasukan tempur utama AS di kawasan Pasifik. Walaupun dalam kesepakatan dengan Australia tidak disebutkan bahwa AS akan mendirikan pangkalan militer permanen, namun diungkapkan akan banyak pasukan AS singgah di sana. Juga, AS tidak boleh membawa senjata nuklir ke dalam wilayah Australia, walaupun kapal (selam atau induk) dengan tenaga nuklir boleh masuk.³

Gelar pasukan marinir AS merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Obama yang semakin sering ke kawasan Asia Pasifik belakangan ini.

¹ Rita Uli Hutapea. "Wow! 2.500 Marinir AS Akan Ditempatkan di Australia," *detikNews*, 16 November 2011, diakses pada 11 Januari 2012.

² "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, diakses pada 11 Januari 2012.

³ "AS Perkuat Militernya di Australia Utara," *Vivanews*, 16 November 2011, diakses pada 11 Januari 2012.

Obama telah beberapa kali ke Indonesia, yaitu Jakarta dan Bali, dan hadir secara langsung dalam pertemuan ASEAN. Pangkalan militer Darwin juga berjarak tidak jauh dengan wilayah Indonesia, yaitu hanya 820 kilometer. Barak Robertson bukan pangkalan militer baru, tetapi selama ini telah ditempati oleh 4.500 tentara Australia.⁴

Gelar pasukan AS di Australia yang dikemas dalam bentuk perjanjian jangka panjang merupakan gelar kekuatan militer AS di kawasan Asia-Pasifik untuk pertama kalinya, sejak berakhirnya Perang Vietnam tahun 1973. Kehadiran militer AS di kawasan ini terus menurun sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan ditutupnya 2 pangkalan militer utamanya di Filipina, yakni Subic Bay dan Clark Field. Karena itu, pemimpin Republik Rakyat Cina (RRC) berpandangan dengan pengumuman kebijakan keamanan barunya tersebut, AS berupaya melakukan strategi pengepungan baru (*new containment policy*) terhadap RRC, baik secara militer langsung maupun ekonomi.⁵ Presiden AS, Obama, sendiri telah mengatakan bahwa AS tidak akan pernah melupakan atau meninggalkan kawasan Asia, sekalipun Perang Dingin telah berakhir.⁶

Mantan Menteri Pertahanan (Menhan) yang kini merupakan anggota Kongres dari Partai Republik dan Co-Chairman US-ASEAN Strategy Commission, William Cohen, dalam kunjungan ke Jakarta dan diskusi di kantor Sekretariat ASEAN mengatakan bahwa AS kini memang lebih peduli dengan Asia. Hal ini disebabkan karena ekonomi ASEAN yang terus tumbuh dan menjadikan kawasan Asia Tenggara kian dinamis. Kemudian, RRC telah muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia dan semakin kuat perkembangan militernya. Namun, Cohen menegaskan, dengan alasan apapun, RRC tidak boleh mendominasi kawasan. Dengan alasan inilah, pemerintah Obama menggeser kebijakan keamanannya dewasa ini, dari fokus di Timur-Tengah, yakni Irak dan Afghanistan, ke Asia Pasifik, agar Asia-Pasifik yang stabil dapat diciptakan dan pertahankan dalam jangka panjang. Cohen menambahkan, dalam kerangka perubahan orientasi kebijakan keamanan, pemerintah AS mengintroduksi strategi baru militernya, karena perang baru diakui masih dapat muncul di kawasan kapan saja, jika pengambil keputusan salah perhitungan, dengan mengambil keputusan yang bias memicu perang.⁷

⁴ "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, *loc.cit*, diakses pada 11 Januari 2012.

⁵ Prayitno Ramelan, "Persewaan AS dan China di Laut China Selatan," *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.

⁶ AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, *loc.cit*, diakses pada 11 Januari 2012.

⁷ "William Cohen: Ingin Memastikan ASEAN Stabil," *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012, diakses pada 11 Januari 2012.

Setelah disepakatinya penempatan marinir AS di Darwin, meningkatnya kehadiran militer AS di Asia-Pasifik dapat dilihat juga dari upaya menjadikan wilayah Australia sebagai pangkalan pesawat pengintai jarak jauh tidak berawak (*drone*). Ijin telah diperoleh dari Pemerintah Australia, walaupun Menhan Australia mengatakan pilihan basis di Kepulauan Cocos masih diperhitungkan karena harus ditingkatkan infrastrukturnya dan fasilitasnya, terutama untuk lapangan terbang. Namun, diakui, lokasi ini adalah yang paling ideal untuk memantau jalur pelayaran paling sibuk di dunia dan juga Laut Cina Selatan.⁸ Kepulauan karang Cocos, dapat dimanfaatkan sebagai pangkalan udara di kawasan Samudera Hindia, Barat Laut Australia, tidak hanya untuk pesawat pengintai berawak, tetapi juga tanpa awak dan senjata, *Global Hawks*.⁹ Dalam rangka proyek itu, Wakil Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Urusan Asia Timur dan Pasifik, Kurt Campbell, berada di sana lebih dari seminggu, selain pula untuk membicarakan realisasi penempatan pertama 250 marinir AS. PM Gillard juga tengah mendiskusikan kemungkinan Kepulauan Cocos dengan Menhan Panetta. Karena itulah, analisis pertahanan dari Universitas Nasional Australia (ANU), Hugh White, mengatakan bahwa Australia merupakan aset strategis AS, sebab dari wilayah benua kanguru itu AS dapat memantau perkembangan RRC serta kehadiran dan kepentingannya di Asia-Pasifik.¹⁰

Tindak lanjut dari perubahan kebijakan keamanan AS diperlihatkan dengan dilancarkannya diplomasi ofensif AS di kawasan. Menlu Hillary Clinton, selain telah memanfaatkan forum lain di luar kawasan untuk *me-lobby* Indonesia dalam mewujudkan strategi barunya itu, juga datang langsung ke Indonesia untuk menemui mitra kerjanya, Menlu Natalegawa, dan bahkan Presiden Yudhoyono pada 3-4 September 2012, khusus membahas perkembangan Laut Cina Selatan dan kerja sama militer.¹¹ Dalam kesempatan tersebut, Menlu Clinton menegaskan, “AS percaya tidak ada satu negarapun yang boleh bertindak semaunya meningkatkan ketegangan atau memperjuangkan klaim teritorialnya.”¹² Walaupun tidak menyebut satu katapun tentang RRC, namun, media paham, penegasan Menlu Clinton diarahkan kepada RRC.¹³ Itulah sebabnya, seperti pada 5 Agustus 2012, ketika pemerintah RRC mengajukan protes keras ke AS atas pernyataan Deplu AS

⁸ Fefy Dwi H dan Andika Hendra M, “Australia Basis Drone AS,” *Seputar Indonesia*, 29 Maret 2012: 16.

⁹ “Australia Bantah Soal Pulau Calon Basis Militer,” *Koran Tempo*, 29 Maret 2012: A14.

¹⁰ Fefy Dwi H dan Andika Hendra M, *loc.cit.*

¹¹ “Kunjungan Hillary Clinton: AS-Indonesia Bahas Laut Cina Selatan dan Kerja Sama Militer,” *Suara Pembaruan*, 3 September 2012.

¹² “Hindari Konflik Wilayah,” *Republika*, 3 September 2012.

¹³ Arif Hulwan, “AS Berupaya Bendung Pengaruh China di Pasifik,” *Media Indonesia*, 2 September 2012: 2.

mengenai Laut Cina Selatan yang menyudutkan RRC,¹⁴ setelah penegasan Menlu Clinton pun, pemerintah RRC mengeluarkan kecaman kepada AS agar jangan ikut campur dalam sengketa teritorial yang tengah berlangsung.¹⁵

B. Permasalahan

Pemerintah Indonesia di bawah SBY tidak terusik dengan pengumuman Presiden AS Obama dan penempatan marinir AS di Darwin. Secara resmi dalam pandangannya, pemerintah SBY tidak menunjukkan kekuatiran, dan sejalan dengan pemikiran bahwa kehadiran gelar pasukan itu dibutuhkan untuk operasi darurat penanggulangan bencana alam, yang akan bermanfaat bagi Indonesia dan negara lain di kawasan yang rawan terhadap bencana alam. Penanggung jawab masalah politik dan keamanan negara, yaitu Menteri Koordinator (Menko) Polkam Marsekal (Purn) Joko Suyanto dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, tidak menanggapi itu sebagai hal yang serius, dan ada kaitan dan dampaknya terhadap perkembangan kawasan kemudian. Yang berpikir dalam kerangka ini melihat bahwa jika memang ada kaitannya dengan upaya merespons kebangkitan militer RRC di kawasan, untuk dapat menimbulkan sebuah ancaman, apalagi untuk menangkal gelar kekuatan AL RRC di kawasan, AS masih perlu membangun pangkalan bagi armada udara F-22 raptor dan kapal induknya, di luar gelar pasukan marinir secara permanen.¹⁶ Wapres Budiono pun secara langsung pernah memberikan tanggapan yang sama, tanpa sikap kritis apalagi mengindikasikan penentangan. Bagi beliau, gelar pasukan marinir AS di Darwin bukan ancaman bagi kedaulatan RI, sehingga tidak perlu harus menjadi perhatian.¹⁷

Diberitakan, satu-satunya sikap kritis yang muncul dari kalangan pemerintah adalah sikap awal Menlu Natalegawa yang menginsyarkan adanya kekuatiran dampak kebijakan AS itu terhadap perkembangan kawasan. Menlu Natalegawa kuatir gelar pasukan marinir AS di Darwin akan menimbulkan reaksi dari RRC dengan meningkatkan kehadiran dan manuver militernya, sehingga berdampak meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Negara-negara di Asia Tenggara yang dimasuki kepentingan AS bermasalah dengan RRC, terutama di perbatasan perairan Laut Cina Selatan,

¹⁴ Lihat, "China Protes Keras AS," *Kompas*, 6 Agustus 2012.

¹⁵ "Hillary Clinton Puji Indonesia: China Kecam AS Jangan Ikut Campur dalam Sengketa," *Kompas*, 5 September 2012.

¹⁶ "AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin," *Kompas.com*, 11 November 2011, diakses 11 Januari 2012.

¹⁷ Ramadhian Fadillah, "Boediono: Tambahan Marinir AS di Darwin Bukan Ancaman," *DetikNews*, 7 Desember 2012, diakses pada 11 Januari 2012.

sehingga kawasan ini akan menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar. Kesalahpahaman dan reaksi yang provokatif, dapat menimbulkan kesalingtidakpercayaan antar-negara akan timbul.¹⁸ Akibat sikap Menlu Natalegawa tersebut, dikabarkan, terjadi hubungan yang dingin (disharmoni) antara Presiden SBY dan Menlu Natalegawa.¹⁹

Analisis hubungan internasional yang kritis menilai sikap pemerintah Indonesia dalam merespons perkembangan kebijakan militer AS di kawasan Asia-Pasifik, lokasi seluruh wilayah kepulauan Indonesia, terlalu awam atau naif. Mereka mencoba mempertanyakan atau mengaitkannya dengan kepentingan nasional AS yang terancam di kawasan ini, terutama Indonesia. Aleksius Jemadu, misalnya, mengingatkan kebijakan luar negeri Indonesia yang mengedepankan keseimbangan yang dinamis harus dijalankan dengan hati-hati. Jika tidak, sikap ini bisa menjebak Indonesia menjadi negara naif, mengingat negara-negara besar dengan kekuatannya cenderung bersikap dominan dan menggunakan kekuatan jika menyangkut kepentingan strategis mereka.²⁰ Sebagai konsekuensinya, menguatnya klaim kedaulatan total RRC atas Laut Cina Selatan, meningkatnya kapasitas, manuver, agresifitas dan provokasi militer RRC yang kian meningkatkan eskalasi konflik di wilayah perairan tersebut, serta meningkatnya ancaman atas kepentingan ekonomi dan korporasi AS di kawasan, khususnya Indonesia belakangan ini, dianggap memiliki relevansi dengan keputusan Presiden AS Obama untuk melakukan perubahan prioritas kebijakan keamanan ke Asia-Pasifik, demi mengamankan kepentingan nasional negara itu. Karena itulah, upaya meneliti hubungan perkembangan kebijakan keamanan AS di Asia Pasifik dewasa ini dengan berbagai pandangan di atas menjadi penting. Hal ini dapat menjawab bagaimana implikasinya terhadap persepsi ancaman keamanan Indonesia, dilihat dari perspektif para pembuat kebijakan di sektor pertahanan-keamanan. Namun, sebelumnya tentu saja, sangat diperlukan mengajukan pertanyaan penelitian berikut ini: apa kepentingan strategis AS terhadap kawasan Asia-Pasifik, khususnya Indonesia?

Di sini, kawasan Asia-Pasifik merujuk pada kawasan yang mencakup negara-negara Asia-Timur dan Asia Tenggara. Kawasan ini cukup luas dan mencakup banyak negara di dalamnya, seperti Jepang, Korea, Cina, Taiwan dan Hong Kong, serta seluruh negara anggota ASEAN dan Australia, yang

¹⁸ "AS di Australia Bukan Ancaman bagi ASEAN," 16 November 2012, <http://us.dunia.vivanews.com/news/read/264838-as-di-australia-buka...> diakses 11 Januari 2012.

¹⁹ David Raja Marpaung, "Ancaman Pangkalan AS di USA di Darwin, Australia," <http://www.Indonesia-defense-analysis.blogspot.com/2011/11/ancaman-pangk...>, diakses 11 Januari 2012.

²⁰ "Kebijakan Luar Negeri Indonesia," *Kompas*, 29 Februari 2012.

pernah terlibat Perang Pasifik dalam Perang Dunia II. Paling sedikit 2 negara di kawasan, yakni Taiwan dan Korea, menjadi rebutan saling pengaruh negara adidaya, sebagai pusat ketegangan, yang juga menjadi ancaman atas keamanan dunia, mengingat potensi kekuatan nuklir yang dimiliki negara adidaya, yang terlibat dalam konflik. Di kawasan ini, terdapat Laut Cina Selatan yang merupakan wilayah panas (*hot spot*), yang rawan konflik terbuka (bersenjata) setiap waktu, antara negara-negara di dalam dan luar kawasan perairan tersebut, apalagi dengan meningkatnya kebutuhan atas energi dan sumber daya alam lainnya dewasa ini. Di kawasan Asia-Pasifik juga terdapat perairan Selat Malaka, Selat Lombok, Laut Arafuru, dan laut-laut dalam lainnya, yang merupakan jalur lintas perairan dan perdagangan internasional.

II. Kerangka Pemikiran

Yang pertama-tama harus dijelaskan di sini adalah bagaimana persepsi ancaman itu dibangun. Dalam teori yang dibangun kalangan realis, persepsi ancaman dikaitkan dengan persepsi para pengambil keputusan tentang kekuatan (*power*). Hal ini logis karena kalangan realis, fokus pada faktor-faktor material (Waltz, 1979). Dalam pandangan ini, negara-negara yang memiliki kekuatan lebih besar cenderung selalu memberikan ancaman kepada negara-negara (tetangga) mereka yang lebih lemah. Sedangkan (varian) realis lainnya, telah memperluas lagi faktor-faktor yang berkontribusi pada ancaman, misalnya, proximitas geographis dan adanya kapabilitas untuk menyerang (Waltz, 1987).²¹

Di pihak yang berlawanan, kalangan konstruktifis, telah menentang hubungan yang deterministik antara kekuatan dan ancaman. Kalangan konstruktifis, yang dalam analisisnya melihat faktor-faktor non-material --yakni ide-ide, nilai-nilai yang dianut, diadopsi atau mempengaruhi para pengambil keputusan, atau pandangan kultural mereka secara luas-- berpandangan bahwa ide-ide adalah variabel yang krusial dalam menilai tingkat ancaman yang ada. Sebagai tambahan, penelitian-penelitian yang lebih maju mengembangkan analisis yang mengaitkan model formasi identitas dengan persepsi ancaman. Kalangan konstruktifis yang menggunakan model analisis ini mengemukakan indikasi bahwa identitas yang di-*share* bersama menurunkan persepsi ancaman, dan identitas bersama merupakan sebuah hubungan yang dikonstruksikan secara sosial, yang keduanya bervariasi dan dapat dimanipulasi.²²

²¹ Lihat, David L. Rousseau, Dan Miodownik, dan Deborah Lux Petrone, "Identity and Threat Perception: An Experimental Analysis," paper presented for annual meeting of the American Political Science Association, S.F. California, 2001.

²² *Ibid.*

Persepsi tentang keamanan nasional menyangkut upaya negara menciptakan rasa aman bagi individu warganya, yang segala kebijakan untuk itu didasarkan pada kepentingan nasional, bukan kelompok dan orang per orang.²³ Setiap kebijakan tentang keamanan nasional harus dirasakan semua warga negara mengingat setiap manusia pada dasarnya membutuhkan rasa aman dan ingin melanjutkan kehidupannya secara damai. Karena keamanan dan kesejahteraan saling mempengaruhi, maka ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional akan mengganggu kondisi kesejahteraan sosial, dan sebaliknya, kondisi kesejahteraan nasional yang buruk akan menimbulkan banyak persoalan di bidang keamanan nasional. Juga, mengingat ancaman terhadap keamanan nasional dewasa ini semakin beragam, makna keamanan nasional lebih luas dari sekadar pertahanan negara dan upaya menangkalnya, seperti yang dikenal sebelumnya. Dalam konteks ini, penyelenggaraan keamanan nasional yang komprehensif menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari gatra kehidupan berbangsa dan bernegara, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan, yang harus memperhatikan kepentingan nasional dalam pergaulan antar-bangsa atau perkembangan hubungan internasional.²⁴

Adapun yang dikategorikan ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional Indonesia sebagaimana yang disusun dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional yang diusulkan pemerintah adalah (1) disintegrasi bangsa, (2) terganggunya kerjasama ekonomi internasional, (3) ketidakstabilan ekonomi nasional, (4) intervensi negara lain, (5) kejahatan lintas negara, (6) ketergantungan terhadap negara lain, (7) ancaman terhadap hukum nasional, (8) ancaman terhadap lingkungan hidup, (9) konflik kawasan, (10) ancaman senjata nuklir, kimia, dan biologi, (11) bencana alam dan non-alam, (12) dan tuntutan sistem baru dalam pemerintahan.²⁵ Dari jenis-jenis ancaman di atas terdapat lebih dari 4 jenis ancaman terkait dengan kehadiran dan interaksi dengan pihak asing, yakni ancaman nomor 2, 3, 4, 7, 9, 11 dan 12. Selanjutnya, dilihat secara lebih khusus, ancaman nomor 2, 4, 9 dan 11 terkait langsung dengan pihak asing. Pada ancaman jenis ke-2, terganggunya kerjasama ekonomi internasional, eskalasinya disebabkan terutama oleh ketidakpastian hukum atau kebijakan pemerintah, dan ketidakpastian jaminan keamanan. Pada ancaman jenis ke-4, campur tangan negara lain, eskalasinya diawali suatu kepentingan negara asing melalui perorangan, kelompok, dan/atau organisasi tertentu dalam

²³ "Dasar Penyusunan Norma," *Naskah RUU Keamanan Nasional, draft* yang diajukan pemerintah (Kementerian Pertahanan --Kemenhan), 2011, hal. 18.

²⁴ *Ibid*, hal. 19.

²⁵ *Naskah Akademik RUU Keamanan Nasional*, yang diajukan pemerintah (*draft* Kemenhan), 2011, hal. 10 *et seqq.*

mengintervensi kebijakan sistem pemerintahan, termasuk dalam penanggulangan terorisme, yang disertai tekanan terhadap pemerintah. Kemudian, pada ancaman jenis ke-9, konflik kawasan, eskalasinya dapat diawali kegiatan spionase, konflik perbatasan, pelanggaran wilayah, *spill over conflict*, blokade, pemboman, dan invasi militer. Sedangkan dalam ancaman jenis ke-11, keterlibatan pihak asing, terkait dengan dilakukannya operasi kemanusiaan (*humanitarian aid*), karena bencana tersebut telah mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan di wilayah yang terkena bencana, terganggu, dan mengakibatkan jatuhnya korban manusia dalam jumlah besar, yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa.²⁶

Persepsi ancaman keamanan pemerintah Indonesia jauh lebih rinci lagi dirumuskan, sebagai masalah keamanan nasional yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Di sini, penggunaan istilah dan/atau menggambarkan bahwa ancaman keamanan nasional yang datang dari luar negeri tidak selalu berdiri sendiri. Di samping itu, maknanya bisa didahului oleh upaya-upaya penggerogotan sasaran dari dalam, sebagaimana yang telah diidentifikasi oleh para ahli dalam 'perang generasi keempat'.²⁷ Namun, memang ancaman militer negara lain selalu merujuk pada adanya gangguan terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional, yang menjadi tanggung jawab TNI, dibantu dengan komponen bangsa lainnya sesuai dengan kompetensi.

Dalam hubungannya dengan persepsi ancaman dan upaya meresponsnya, secara khusus perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan operasional dan strategi militer dalam perspektif kepentingan Indonesia adalah penentuan dan penetapan tentang pembangunan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan TNI berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.²⁸ Dalam hubungan dengan matra laut, perlu dipahami bahwa masalah keamanan laut tidak hanya merupakan masalah penegakan hukum, namun juga kondisi laut yang aman digunakan oleh para penggunanya, dari berbagai negara, dan bebas dari segala bentuk ancaman atau gangguan. Termasuk gangguan ini di antaranya, ancaman kekerasan, seperti ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase objek vital, dan aksi teror bersenjata di laut, dan bebas dari ancaman navigasi, ancaman terhadap sumber dayanya, serta ancaman dari pelanggaran hukum.

Walaupun pemahaman atas keamanan nasional sudah berkembang luas, dikaitkan dengan konsolidasi demokrasi, terciptanya keadilan, pembangunan ekonomi atau kesejahteraan warga negara, dan lingkungan hidup yang

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ "Penjelasan RUU Keamanan Nasional," draft Kemenhan, 2011, hal. 10, *op.cit.*

nyaman dan aman, dengan turut menyurutnya aksi-aksi kejahatan dan kekerasan pada umumnya serta intabilitas negara, di tingkat internasional, tujuan keamanan nasional tetap tidak dapat dipisahkan dengan segala tindakan untuk mempertahankan kedaulatan, integritas teritorial, kebebasan politik, dan promosi keamanan kawasan.²⁹ Analisis studi keamanan seperti Buzan, sejak dini telah memperkenalkan pemahaman atas konsep keamanan dalam makna yang lebih kompleks.³⁰ Sementara, kalangan realis, sejak dulu tetap menekankan masalah keamanan nasional sebagai masalah pertahanan atau militer, sehingga fungsi utama negara adalah melindungi penduduknya dari setiap ancaman luar yang membahayakan.³¹ Jika mengaitkannya dengan pandangan yang spesifik Indonesia, lainnya, misalnya, mantan Menhan Juwono Sudarsono, keamanan nasional ada di tempat dari sistem keamanan nasional yang komprehensif. Keamanan nasional mencakup pertahanan negara, yang fungsinya harus dikordinasikan oleh pemerintah nasional dalam rangka menghadapi ancaman yang datang dari luar negeri untuk menegakkan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan, dan keutuhan NKRI.³²

Jadi, walaupun sudah berkembang sebagai konsep yang komprehensif, keamanan nasional tetap merupakan bagian penting yang harus diperhatikan, bersama-sama keamanan insani (*human security*), mengingat ia merupakan respons atas ancaman keamanan negara, keamanan, dan integritas wilayah nasional, atau teritorial. Di sisi lain, keamanan nasional berdimensi militer, dalam bentuk ancaman maupun solusinya, walaupun tidak mengenyampingkan adanya solusi diplomatik yang efektif. Ini berarti, dalam perspektif keamanan nasional Indonesia, sarana utama penanggulangan yang digunakan adalah militer, atau dengan didukung kekuatan senjata.³³

Selanjutnya, perlu dipahami bahwa kepentingan keamanan nasional selalu berubah. Ia dapat dilihat dari 2 perspektif, yakni, *pertama*, apa yang disebut sebagai kepentingan keamanan nasional yang berpijak dari masalah-masalah atau ancaman-ancaman yang sedang, atau diantisipasi akan mengancam upaya pencapaian tujuan nasional (*issue-based national security, threat-based national security*). Contohnya adalah krisis ekonomi, gangguan separatisme, pemberontakan bersenjata dan lain-lain. Sedangkan kedua adalah yang telah

²⁹ Lean le Roux, "Defining defence requirements: Force design considerations for the South African National Defense Force," *African Security Review*, Vol. 8, No. 5, 1999, hal. 1.

³⁰ Lihat, misalnya, Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1991.

³¹ Lihat untuk ini, misalnya, Eugene J. Meehan, *The Dynamics of Modern Government*, 1966: hal. 365-472.

³² Juwono Sudarsono, Materi Rapat di Cikeas, Bogor, 11 Februari 2007.

³³ Hasnan Habib, "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia," makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.

dikenal sebagai *interest-based national security*, yakni keamanan nasional sebagai sebuah kepentingan yang harus dipenuhi dalam rangka mencapai tujuan nasional itu, antara lain, mempertahankan integritas wilayah, kedaulatan nasional, dan seterusnya, yang lebih bersifat mendasar dan jangka panjang dibandingkan dengan perspektif pertama.³⁴

III. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptis-analitis. Lapornya mempresentasikan dan membahas temuan riset kepustakaan dan informasi yang diperoleh dari berbagai wawancara mendalam. Analisis atas berbagai temuan merupakan bagian dari informasi yang dipresentasikan dalam laporan penelitian akhir yang utuh.

Penelitian lapangan dilakukan di wilayah Provinsi Papua, provinsi tempat berlokasi perusahaan tambang milik AS yang sangat bermasalah, yakni PT Freeport. Provinsi ini dewasa ini memperoleh perhatian pemerintah AS, dan letaknya tidak jauh jaraknya dari Darwin, Northern Territory, Australia --basis penempatan pasukan marinir AS. Provinsi lainnya adalah Nusa Tenggara Timur, yang juga letaknya tidak jauh dari Darwin, yang memiliki perusahaan tambang milik AS yang sering dilanda aksi unjuk rasa.

A. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan teknik wawancara mendalam melalui kunjungan ke lapangan (*field research*). Wawancara mendalam (*In-depth interview*) secara terbuka dilakukan dengan pihak-pihak yang melakukan tugas pokok dalam masalah pertahanan-keamanan di matra laut, udara, dan darat, seperti Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), Angkatan Darat (AD).

B. Teknik Analisis Data

Data tertulis (dokumen) di-*cross-check* dengan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam. Data yang diperoleh dari berbagai macam sumber tersebut, apakah itu primer maupun sekunder, dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Selanjutnya, setelah melalui pembahasan yang mendalam, dibuat kesimpulan dan rekomendasi bagi pembuatan kebijakan.

³⁴ Edy Prasetyono, "Sistem Keamanan Nasional," makalah penjelasan Naskah RUU Keamanan Nasional, *draft* Kemenhan, 2011.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Kepentingan Ekonomi dan SDA

Temuan studi kepustakaan memperlihatkan, Presiden Obama dengan perubahan, atau orientasi baru kebijakan keamanannya di Asia Pasifik, ingin menancapkan kehadiran yang lebih nyata, massif, dan intensif untuk mengimbangi kehadiran kekuatan RRC. Laut Cina Selatan menjadi titik api (*flash point*) di kawasan Asia-Pasifik, karena ia merupakan salah satu kawasan, yang memiliki potensi kekayaan minyak bumi dan gas alam yang besar di dunia. RRC memperkirakan terdapatnya cadangan minyak di sana sebesar 213 miliar barel, atau sekitar 10 kali lipat cadangan nasional Amerika Serikat (AS).³⁵ Sementara, menurut AS, Laut Cina Selatan memiliki potensi sekitar 28 miliar barel minyak dan sekitar 900 triliun kaki kubik gas alam, yang sama potensinya dengan cadangan minyak yang dimiliki Qatar.³⁶

Begitu pula, setengah dari armada dagang dunia yang besar melewati jalur perairan ini dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, dengan nilai perdagangan sebesar US\$ 5 triliun setiap tahunnya.³⁷ Selat Malaka, yang menjadi penghubung Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan, juga sangat penting artinya di kawasan Asia-Pasifik. Melalui selat ini, terdapat sekitar 400 kapal yang lewat setiap hari, terutama kapal-kapal niaga dan logistik.³⁸

Di Indonesia, khususnya Papua, AS mempunyai kepentingan yang besar atas Sumber Daya Alam (SDA) sejak lama. Ketergantungan AS pada SDA Indonesia semakin menjadi setelah diketahui belakangan bahwa sebanyak 95% cadangan emas perusahaan tambang transnasional asal negeri itu, yakni Freeport McMoran Copper & Gold Inc., terdapat di Grasberg. Berdasarkan data yang diumumkan 31 Desember 2011, Freeport mempunyai cadangan terbukti dan cadangan terkonsolidasi mencapai 119,7 miliar pound tembaga, 33,9 juta ounces emas, 3,42 miliar pound molybdenum, 330,3 juta ounces perak, dan 0,86 miliar pound cobalt.³⁹

Dihitung secara total, cadangan tembaga AS di Indonesia sebanyak 26%. Sampai 30 Desember 2010, jumlah cadangan tambang yang telah dilaporkan pada Pemerintah Indonesia mencapai 2.574.744 ton, dengan kadar tembaga 0,98%, emas 0,83% per ton (g/t), dan perak 4,11 g/t. Lebih jelas lagi, pabrik

³⁵ Laporan Lembaga Informasi Energi AS (*Information Energy of America* -IEA). *BBC online*, 21 Juli 2011, diakses pada Februari 2013. 26 Februari 2013.

³⁶ "Sengketa Kepemilikan Laut Cina Selatan," *BBC online*, 21 Juli 2011, *ibid*, diakses pada Februari 2013. 26 Februari 2013.

³⁷ Randy Fabi dan Manuel Mogato, "Maritime conflict looms in South China sea oil rush," *The Jakarta Post*, 29 Februari 2012.

³⁸ "RI Berkepentingan Jaga Keamanan Laut Cina Selatan," *Suara Pembaruan*, 4 Juni 2012: 3.

³⁹ "95% Cadangan Emas Freeport Ada di Papua," *Suara Pembaruan*, 7 Maret 2012.

pengolahan Freeport mampu memproses 200-250 ribu ton biji per hari. Tambang terbuka Grasberg diketahui menyumbangkan lebih 75% total produksi, sedangkan tambang bawah tanah menyumbangkan sekitar 25%. Di masa depan, pabrik pengolahan biji akan memproses biji yang seluruhnya berasal dari tambang bawah tanah.⁴⁰

Melalui anak usahanya, PT Freeport Indonesia, Freeport McMoran berinvestasi di Indonesia lewat Kontrak Karya (KK) generasi pertama pada tahun 1967. KK diperpanjang konsesinya pada tahun 1991 dan akan berakhir pada tahun 2021. PT Freeport Indonesia masih memiliki hak memperpanjang 2 kali 10 tahun, setelah berakhirnya masa kontrak tahun 2021, atau akan berakhir pada tahun 2041. Adapun lahan konsesinya mencakup 177 ribu hektar di Kabupaten Mimika, dengan mengoperasikan tambang di Distrik Grasberg.⁴¹

Seperti telah diungkapkan, selain menghasilkan tambang tembaga, Grasberg menghasilkan tambang emas dan perak dalam jumlah signifikan. Adapun saham PT Freeport Indonesia meliputi 81,28%, yang dimiliki Freeport McMoran, 9,36% oleh PT Indocopper Investama, dan sisa sebesar 9,36% milik Pemerintah Indonesia. Di masa depan terdapat kemungkinan perluasan lahan eksploitasi menjadi 100 ribu hektar. Dilaporkan, perusahaan ini telah mengalokasikan dana sebesar US\$ 16-18,5 miliar untuk membuat tambang bawah tanah.⁴² Yang lebih penting lagi, setelah tambang bawah tanah mulai berproduksi pada tahun 2017, produksi perusahaan mayoritas akan berasal dari tambang ini.

Adanya kepentingan AS di balik perubahan kebijakan keamanannya di Asia Pasifik, dengan penempatan pasukan marinirnya di Australia, tidak luput sama sekali dari pengamatan kalangan (perwira) AL Indonesia. Kolonel Laut Sunarno Adi, Asisten Operasi Lantamal VII, misalnya, melihat relevansi kehadiran marinir AS di Darwin dengan kebijakan keamanan pemerintah AS secara langsung untuk mengamankan kepentingan ekonominya di Indonesia, seperti Freeport, apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, dalam situasi darurat, ketika muncul ancaman dan gangguan keamanan di sana. Menurut perwira operasi AL tersebut, hal ini dilatarbelakangi perkembangan kawasan yang tidak kondusif belakangan, selain juga di Papua, yakni persaingan kekuatan angkatan bersenjata untuk mengontrol kawasan antara negara adidaya RRC dan AS, serta meningkatnya aktifitas dan gangguan keamanan yang dilancarkan kelompok separatis, Organisasi Papua Merdeka (OPM).⁴³

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ Wawancara dengan Kolonel Laut Sunarno Adi, Asisten Operasi Lantamal VII, di Provinsi NTT, pada 28 Juli 2012.

Di wilayah perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III juga terletak Timor Leste yang kaya tambang minyak di Celah Timor-nya, dan diduga memiliki simpanan uranium. Dari perhitungan geo-strategis, wilayah perairan ini sangat baik untuk dijadikan pangkalan militer. Buat AS, di kawasan timur Indonesia ini terletak potensi yang baik bagi alternatif pembangunan pangkalan militer baru. Dari lokasi basis atau pangkalan militer di sini, AS dengan mudah dapat mengontrol kondisi keamanan ratusan perusahaan transnasionalnya, yang tersebar di bumi Papua, Jawa, Sumatra, Kalimantan, dan bahkan di luar wilayah Indonesia lainnya, seperti Filipina, Papua New Guinea, dan Australia.⁴⁴

Di lain sisi, AS memiliki kepentingan mengamankan transportasi logistik untuk komoditas minyak dan banyak komoditi lainnya *via* Selat Malaka. Seperti dijelaskan Komandan Komando Pasifik AS, Laksamana Robert F. Willard, kepentingan realistik AS atas Laut Cina Selatan dapat dilihat dari eksistensi kawasan itu, yang nilai jalur lautnya untuk perdagangan bilateral setiap tahun bernilai US\$ 5,3 triliun, yang sebesar US\$ 1,2 triliun secara langsung terkait kepentingan AS.⁴⁵

Kemudian, AS memiliki kepentingan terkait implementasi proyek Coral Triangle Initiative (CTI), yang wilayahnya merupakan kawasan segitiga SDA seluas 75 ribu km², meliputi 6 negara di Asia Pasifik, seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Kepulauan Solomon, Timor-Leste, dan Papua Nuigini. Jika dicermati, agendanya ternyata tidak semata untuk membuka peluang konservasi kawasan laut penyerap karbon (*conserving coastal carbon sinks*), tetapi juga untuk bisnis di bidang pariwisata, pengolahan ikan tuna, dan investasi berbasis SDA kelautan dan perikanan, serta minyak dan gas bumi. Di kawasan ini terdapat berbagai perusahaan multinasional yang selama ini telah mengincar peluang investasi, dengan ikut aktif dalam berbagai agenda pertemuan CTI, termasuk perusahaan minyak asal AS, yaitu Exxon Mobil Exploration dan Anova Food LLC, yang terkenal dengan bisnis ikan bersiripnya, khususnya tuna. Pemerintah AS juga selama ini telah mendukung pendanaan *regional exchange program* CTI di sejumlah wilayah Indonesia, seperti Anambas, Natuna, Berau, Selat Makasar, Wakatobi, Nusa Penida, Laut Sawu, *Bird Head Seascape*, Raja Ampat, West Kei, Bali, dan Padaido.⁴⁶

⁴⁴ Eddy Maszudi, "Segitiga RI, Timtim, dan Australia," <http://www.eastasiastudy.blogspot.com/2005/09/di-plomasi-indonesiaasutralia...>, diakses 30 januari 2012.

⁴⁵ Prayitno Ramelan, "Perseteruan AS dan China di *Laut Cina Selatan*," *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.

⁴⁶ *Ibid.*

Di samping itu, mitra CTI, yakni World Ocean Council (WOC), sejak awal telah diketahui mengkampanyekan sektor swasta sebagai pemanfaat utama laut untuk menjamin pemanfaatan ekosistem laut secara berkesinambungan. WOC sendiri anggotanya terdiri dari perusahaan-perusahaan minyak multinasional utama seperti BP, Exxon Mobil, Rio Tinto dan Shell.⁴⁷ Sementara itu, 80 persen wilayah Indonesia diketahui masuk dalam kawasan segitiga terumbu karang. Namun, selama ini dalam kegiatannya tidak melibatkan masyarakat nelayan Indonesia yang hidupnya bergantung pada SDA laut dan pesisir. Yang lebih penting lagi, kesepakatan dalam CTI tidak menawarkan langkah nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim, dan alpa dalam memberikan perlindungan terhadap perairan tangkap tradisional dan hak-hak nelayan tradisional.⁴⁸

B. Mengimbangi Dominasi RRC

Perlu digaribawahi pendapat analis militer, pertahanan-keamanan, dan masalah-masalah internasional dari Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, yang mengatakan bahwa kepentingan negara-negara di kawasan akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim, begitu pula respons mereka terhadap ancaman keamanan yang muncul.⁴⁹ Mengingat kondisi riil dan perkembangan lingkungan strategis yang ada, kepentingan dan respons kebijakan mereka akan terkait dengan perlindungan terhadap komunikasi laut (*Sea Lanes of Communication*, SLOC) dan jalur perdagangan laut (*Sea Lanes of Trade* --SLT), yang sangat vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, dan ekonomi. Bahkan, dimensi maritim tersebut akan menentukan kebijakan keamanan yang diambil, dalam hal pilihan-pilihan strategis untuk memproyeksikan kemampuan mereka, ke luar batas teritorial nasional. Dengan demikian, dalam sebuah kawasan yang berdimensi maritim yang sangat kuat, hanya negara yang membangun atau mempunyai kekuatan maritim yang besar yang akan banyak mengendalikan percaturan politik dan perkembangan strategis di kawasan tersebut.

Pada kenyataannya, kawasan Asia-Pasifik telah mengalami perkembangan yang cepat ke arah seperti itu, jauh dari yang semula telah diantisipasi para pengamat.⁵⁰ Dapat dikatakan, perkembangan lingkungan strategis di kawasan ini telah sampai pada tahap kompetisi kuat untuk memperebutkan dominasi atas matra laut, sehingga supremasi di laut akan dimiliki. Penguatan militer AS di Asia-Pasifik dapat dilihat dalam konteks ini. AS tidak hanya telah meningkatkan kemampuan pengawasan militernya, tidak hanya untuk AL,

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Edy Prasetyono, "Masalah-masalah Bidang Pertahanan Keamanan," Jakarta, CSIS, tanpa tahun, hal. 3.

⁵⁰ *Ibid.*

tetapi juga kekuatan pasukan tempur Marinir dan AU-nya. Tidak hanya aktifitas patroli dan kontrol udara, tetapi kesiapan untuk melakukan serangan pencegahan sedini mungkin (*pre-emptive strike*).

Kepentingan Geopolitik AS mengungkapkan bahwa di sebelah Barat, negara itu berbatasan dengan Lautan Pasifik. Karenanya, di Pasifik, yakni Hawaii, terdapat pangkalan udara Hickam, yang merupakan basis *Pacific Air Force* (PACAF), selain di Yokota Jepang, dan Osan Korea Selatan. Adapun PACAF merupakan komando utama AU AS di luar wilayah negeri itu, yang dipimpin jenderal berbintang empat, sarat dengan pengalaman tempur di berbagai periode dan mandala tempur, terutama di Asia Pasifik.⁵¹

Meningkatnya persepsi ancaman keamanan AS yang datang dari RRC tampak dari peningkatan kontiniu anggaran militer RRC, yang pada tahun 2012 mengalami kenaikan 11,2%, atau sebesar US\$ 100 miliar dibandingkan dengan tahun 2011, sekalipun masih lebih rendah daripada anggaran militer AS, atau dalam posisi terbesar kedua di dunia.⁵² Pada tahun 2011, anggaran belanja militer RRC adalah US\$ 91,5 miliar, sedangkan tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar US\$ 81 miliar dan US\$ 70,2 miliar. Peningkatan drastis kian terasa jika dibandingkan dengan anggaran belanja militer tahun 2006, 2007, dan 2008, yang masing-masing baru mencapai, namun terus mengindikasikan peningkatan, US\$ 34, 9 miliar, US\$ 45 miliar, dan US\$ 61, 1 miliar.⁵³

TABEL BELANJA MILITER RRC

TAHUN	JUMLAH BELANJA
2006	US\$ 34,9 miliar
2007	US\$ 45 miliar
2008	US\$ 61,1 miliar
2009	US\$ 70,2 miliar
2010	US\$ 81 miliar
2011	US\$ 91,5 miliar
2012	US\$ 100 miliar

Pertumbuhan anggaran pertahanan RRC tercatat sekitar 12% per tahun dari tahun 2000-2009.⁵⁴ Secara resmi, di Kongres Parlemen, PM Wen Jiabao

⁵¹ Prayitno Ramelan, "Marinir AS di Australia dan 70 Pasukan AS di Papua, Sebuah Ulasan," <http://www.hankam.kompasiana.com/2011/11/30/marinir-as-di-australia-da>, diakses 11 Januari 2011.

⁵² Pada tahun 2010 anggaran militer RRC hanya terpaut 4,85 dengan militer AS. Pada tahun 2014, AS memproyeksikan kenaikan anggaran militer (pertahanan) sebesar US\$ 533,6 miliar. Lihat, "China Tingkatkan Anggaran Militer," *Media Indonesia*, 5 Maret 2012.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ "Pertahanan Cina Diperkuat: Anggaran Berganda, Pakai Kas Tambahan untuk Modernisasi Senjata," *Kompas*, 15 Februari 2012.

mengaitkan ini dengan tujuan peningkatan kemampuan militer negaranya untuk memenangkan apa yang mereka sebut sebagai “perang lokal”.⁵⁵ Adapun istilah ini merujuk pada persengketaan wilayah RRC dengan negara-negara tetangganya, terutama di Laut Cina Selatan. Selama 2 dasawarsa terakhir, militer RRC, yakni Tentara Pembebasan Rakyat luput dalam pengembangan kapasitasnya. Namun, kebutuhan mengawal kepentingan kontinuitas pertumbuhan negara itu yang sangat dinamis di kawasan mendorong pemimpin politik di negeri komunis tersebut membelanjakan miliaran dollar AS untuk peralatan militer modern, termasuk jet tempur siluman versi baru J-20,⁵⁶ kapal selam dan kapal induk nuklir, kapal modern yang dipersenjatai rudal supersonik antikapal, rudal balistik antarbenua, misil yang bisa menembak jatuh satelit, dan seluruh kekuatan militer dengan teknologi perang *cyber*.⁵⁷

Di lapangan, meningkatnya kehadiran militer AS di kawasan diperlihatkan dengan kehadiran yang kian aktif dari pimpinan militer (komando tinggi) AS di lapangan. Sebagai contoh, pada 10 Februari 2012, Komandan Marinir AS untuk Asia-Pasifik, Letnan Jenderal (Letjen) Duane Thissen, melakukan kunjungan ke Markas Komando Brigif II, Cilandak, Jakarta, untuk tujuan mempererat kerja sama militer, terutama di bidang pertahanan, kedua negara, dan juga meningkatkan profesionalisme prajurit marinir kedua negara.⁵⁸ Letjen Thissen dalam kunjungannya diterima langsung orang nomor satu di pasukan marinir Indonesia, yaitu Mayor Jenderal (Mayjen) M. Alfian Baharudin, Komandan Korps Marinir (Dankormar). Ketika ditanya pers, Letjen Thiessen menegaskan bahwa keberadaan militer AS di Darwin memiliki dampak positif bagi Indonesia dan kawasan. Ini dapat diartikan, tidak hanya untuk fungsi penanggulangan bencana alam. Sebab, Letjen Thiessen melanjutkan bahwa dengan kehadiran pasukan marinir AS di Australia itu, pasukan kedua negara dapat berlatih bersama dan meningkatkan kemampuan profesional mereka; dan diketahui tupoksi pasukan marinir AS adalah sebagai kekuatan utama matra laut yang nyata di daratan --seberang lautan atau negara lain, dalam perspektif kepentingan AS.

Kedatangan Komandan Marinir AS untuk Kawasan Asia-Pasifik dilengkapi oleh kunjungan orang nomor dua di Departemen Pertahanan AS, yakni Wakil Menhan AS Bidang Strategi, Daniel Y. Chiu, ke Kementerian Pertahanan

⁵⁵ “Anggaran Militer US\$ 100 Miliar: Tiongkok Ingin Menangi ‘Perang Lokal’”, *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2012.

⁵⁶ Estimasi belanja untuk 1 pesawat tempur siluman Chengdu J-20 = US\$ 110 juta, lihat, “China Tingkatkan Anggaran Militer,” *Media Indonesia*, 5 Maret 2012: 12, *loc.cit*.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ “Kunjungan Marinir AS,” *Suara Pembaruan*, 11 Februari 2012.

(Kemenhan) Indonesia. Dalam kesempatan itu, Chiu mengakui peran penting Indonesia di kawasan,⁵⁹ dan bahkan mengatakan secara eksplisit bahwa hal itu merupakan upaya menjaga keseimbangan kawasan. Lebih jelas lagi, menurut Chiu, keberadaan pangkalan dan marinir AS di sana bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan dan fokus keamanan (*rebalancing and refocusing*) di kawasan sekitar. Selama ini diakui, AS seperti sudah meninggalkan kawasan, sehingga AS perlu memperlihatkan kembali komitmennya untuk hadir dan menjaga hubungan baik melalui kordinasi dan kerja sama.⁶⁰ Hal ini konsisten dengan kehadiran Obama sebagai *America's First Pacific President*, dan upaya Obama membangun "*America's Pacific Century*."

Kemudian, seraya menegaskan bahwa kehadiran marinir AS di Darwin tidak akan mengganggu kedaulatan Indonesia, Dubes AS di Indonesia, Scot Marciel, mengatakan bahwa kehadiran itu merupakan perjanjian dan bentuk aliansi AS dan Australia yang terjalin sejak dulu, yang berada di kawasan dalam rangka memelihara perdamaian.⁶¹ Pernyataan ini sekaligus kian menjelaskan arti kehadiran marinir AS di kawasan yang banyak diperdebatkan tersebut, dari pandangan pejabat resmi AS yang sedang bertugas di Indonesia.

Hal inilah tampaknya juga yang menyebabkan pemerintah AS telah memberikan bantuan bagi pembangunan fasilitas barak pelatihan pasukan perdamaian TNI, senilai US\$ 3,3 juta. Dari informasi yang diperoleh, bantuan keseluruhan yang diberikan melalui program tahun jamak tersebut mencapai US\$ 14 juta. Sedangkan peletakan batu pertama pembangunan barak dilakukan oleh Dubes Marciel dan Wakil Menlu AS Andrew Shapiro pada 13 Februari 2012, di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian, Sentul, Jawa Barat. Kehadiran kedua pejabat penting pemerintah AS yang mempunyai misi resmi di Indonesia itu menunjukkan pentingnya tugas yang mereka lakukan di balik program kemanusiaan, pembangunan, ataupun "perdamaian" nama inisiatifnya, sebagaimana yang dikenal dalam program-program bantuan atau kerja sama bilateral AS dengan negara Indonesia dan lainnya.⁶²

Secara signifikan, pasca-pencanangan gelar pasukan AS di Asia Pasifik, kehadiran personil dan kapal-kapal perang AS mengalami peningkatan di Indonesia, mulai dari kapal-kapal perang utama, seperti USS Blue Ridge, yang

⁵⁹ "Global Peace Operation Initiative," lihat "Peran Indonesia Penting di Asia Tenggara," *Kompas*, 11 Februari 2012.

⁶⁰ "Pangkalan AS di Darwin Menjaga Keseimbangan," *Kompas*, 13 Februari 2012.

⁶¹ Prayitno Ramelan, "Marinir AS di Australia dan 70 Pasukan AS di Papua, Sebuah Ulasan," <http://www.hankam.kompasiana.com/2011/11/30/marinir-as-di-australia-da>, *loc.cit.*, diakses 11 Januari 2011.

⁶² Untuk pembangunan barak tersebut program inisiatifnya bernama "Global Peace Operation Initiative," lihat "Peran Indonesia Penting di Asia Tenggara," *Kompas*, 11 Februari 2012: 4, *ibid.*

menjadi markas komando Armada VII, yang buang sauh di Tanjung Priok, hingga kapal-kapal perang seperti USS Vandergrift, USS Germantown LSD-42, dan USCG Waesche, yang bersandar di Tanjung Perak.⁶³ Kehadiran dua kapal perang yang terakhir disebut ini juga merupakan bagian dari latihan bersama dengan TNI-AL, dengan sandi “Carat 2012” (*Cooperation Afloat Readiness and Training*), yang dilakukan di Balongan, Situbondo.⁶⁴ Meskipun latihan dengan sandi “Carat” itu sudah dilakukan beberapa tahun, namun peningkatan dan frekuensi kehadiran kapal-kapal perang AS semakin jelas. Misalnya, dalam latihan “Carat 2012” ini, sebanyak 830 pasukan AL AS dalam jajaran *US Pacific Command* terlibat,⁶⁵ bersama-sama dengan 1.244 prajurit TNI-AL --sebuah jumlah yang cukup besar dan sebanding.

Selanjutnya, peningkatan kehadiran angkatan laut AS juga diperlihatkan dengan kedatangan kembali untuk kedua kalinya kapal AL-AS, USNS Mercy, ke Manado, Provinsi Sulawesi Utara.⁶⁶ Walaupun kedatangan kapal USNS Mercy tersebut sebagai bagian dari operasi kemanusiaan di bawah koordinasi dengan Mabes TNI, namun langkah ofensif ini bisa dikatakan merupakan kombinasi langkah militer dan diplomasi untuk semakin mendekatkan hubungan bilateral militer AS dengan Indonesia. Kedatangan ke Provinsi Sulawesi Utara dilakukan pada 31 Mei-15 Juli 2012, dalam jangka waktu yang cukup lama, dengan kegiatan bakti sosial, serupa seperti tahun sebelumnya, dalam kerangka *Pacific Partnership*. USNS Mercy melakukan kegiatan yang sama di provinsi tetangganya, yaitu Maluku Utara, yang sama-sama posisinya sangat strategis, di bibir Lautan Pasifik, yang kaya sumber daya alam dan terletak di wilayah ALKI III.⁶⁷ Seperti diungkapkan Dubes AS di Indonesia, Scot Marciel, bentuk kerja sama ini adalah formal, yakni antara kedua pemerintah yang ada. Namun, juga tidak dapat diabaikan, bahwa kegiatan USNS Mercy ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan *soft power* AS, dengan tujuan memperoleh simpati, sebagai langkah awal untuk menanamkan pengaruh dan memperoleh dukungan kebijakan di kawasan.

Peningkatan kehadiran AS di kawasan Asia-Pasifik kian ditegaskan oleh Menhan Panetta, dalam acara dialog pertahanan kawasan, *Shangri-la Dialogue*, yang diadakan di Singapura pada awal Juni 2012. Sebagai bagian dari upaya

⁶³ Di Singapura, AS mengirim 4 kapal perang khusus perairan dangkal (Littoral Combat Ship –LCS) pada semester pertama tahun 2012 ini. Lihat Arif Hulwan, “China Tuding AS Cari Masalah,” *Media Indonesia*, 6 Juni 2012.

⁶⁴ “Kapal Perang Amerika di Surabaya,” *Kompas*, 30 Mei 2012.

⁶⁵ “Latma Carat 2102,” *Media Indonesia*, 6 Juni 2012.

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Keterangan Sultan Ternate dalam wawancara di Ternate, Maluku Utara, pada 2011.

memperkuat kehadiran AS di kawasan, dalam kunjungan Menhan Panetta ke Singapura, terdapat kesepakatan yang telah dicapai AS dengan Singapura, untuk menyandarkan lebih banyak lagi kapal-kapal perang AS di pelabuhan Singapura, untuk *overhaul*, terutama mengisi logistik, sebelum melanjutkan operasi di kawasan. Bagi Singapura, sekalipun prajurit-prajurit AS tidak diijinkan ke daratan, kehadiran kapal-kapal perang AS turut memberikan jaminan atau menyediakan keamanan bagi negeri kecil di Asia-Tenggara itu.

Masih dalam rangka *Shangrila Dialogue*, Menhan Panetta juga mengungkapkan niat AS untuk mendapatkan akses bagi kapal-kapal perang AS untuk memanfaatkan fasilitas pelabuhan di bagian selatan Vietnam, mantan sekutu hebatnya yang pernah mengalahkannya dalam Perang Vietnam.⁶⁸ Menhan Panetta mengungkapkan minat AS pada Pelabuhan Cham Ranh Bay, yang berada di perairan laut dalam dan letaknya sangat strategis, sekitar 450 mil atau 720 km arah selatan RRC, dalam kunjungan langsung ke sana.⁶⁹ Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama petinggi AS ke Vietnam sejak berakhirnya Perang Vietnam. Pelabuhan ini akan digunakan AS untuk kapal perang AS yang berlayar dari perairan Barat menuju sejumlah pangkalan di kawasan Pasifik.

Langkah pragmatisme AS tampaknya sudah diperhitungkan dan diperkirakan didukung mantan musuhnya itu, mengingat di pelabuhan itu kapal logistik angkatan laut AS, seperti USNS Richard E. Byrd, sebagai bagian dari 20 kapal-kapal AS, yang selama ini sudah boleh berlabuh,⁷⁰ dan Vietnam sendiri selama ini sangat terancam oleh manuver-manuver dan ancaman agresif angkatan perang RRC. Sementara, petinggi militer RRC, Letjen Ren Haiquan, mencurigai niat itu terkait dengan perkembangan sengketa Laut Cina Selatan yang semakin panas.⁷¹ Eskalasi kehadiran kapal-kapal perang AS di kawasan Pasifik akan terus terjadi sampai beberapa tahun ke depan, dengan target sampai 60%:40%, dibandingkan kekuatan militernya di kawasan Atlantik sampai tahun 2020,⁷² dari semula 50%:50%, sejalan dengan peningkatan ekonomi dan pengembangan dan kehadiran militer RRC di kawasan.

Gambaran adanya peningkatan eskalasi ketegangan di kawasan yang berdampak pada perubahan kebijakan dan strategi keamanan AS di kawasan terefleksi juga dari apa yang dipamerkan dalam *Singapore Airshow 2012*. Dari salah satu negeri kecil di kawasan yang sangat pula berkepentingan dengan

⁶⁸ *Running Text* Metro TV, 3-4 Juni 2012.

⁶⁹ "Amerika Ingin Vietnam Buka Pelabuhannya," *Koran Tempo*, 4 Juni 2012: A14.

⁷⁰ Julian E. Barnes, "US Heralds Navy's Shift Toward Asia," *The Wall Street Journal*, June 4, 2012: 1 & 20.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Dika Dania Kardi, "Kapal Perang AS Merapat ke Asia Pasifik," *Media Indonesia*, 4 Juni 2012: 4. Juga, Julian E. Barnes, "US Heralds Navy's Shift Toward Asia," *The Wall Street Journal*, June 4, 2012: 1 & 20.

perkembangan (ancaman) keamanan di kawasan, dilaporkan bahwa pesawat-pesawat jet tempur, radar, dan kapal patroli AL adalah produk-produk militer terancang yang dicari oleh negara calon konsumen di kawasan.

Secara kuantitatif, dilaporkan bahwa total belanja pesawat militer di Asia Timur akan melonjak hingga US\$ 24,3 miliar pada tahun 2015, dan sebesar US\$ 15,9 miliar pada tahun ini saja.⁷³ Untuk RRC, anggaran militer akan dinaikkan 2 kali lipat dari yang ada tahun ini (2012), menjadi US\$ 238,2 miliar, atau mengalami kenaikan sekitar 18,75% per tahun dalam kurun waktu itu.⁷⁴ Terkait dengan lonjakan drastis anggaran militer RRC, pemerintah RRC dikatakan berani menggunakan kas tambahan untuk modernisasi senjata dan armada pertahanan. Angka kenaikan pada tahun 2015 yang dinilai fantastis ini akan mengalahkan total anggaran pertahanan negara-negara kunci (sebanyak 12 negara) di Asia Pasifik, yang diperkirakan hanya mencapai total US\$ 232,5 miliar.⁷⁵

Secara spesifik, pengadaan kapal selam akan melonjak hingga US\$ 3,1 miliar.⁷⁶ Hal ini bisa dipahami dihubungkan dengan dinamika akhir-akhir ini di kawasan di bidang politik, ekonomi, militer, dan pertahanan.⁷⁷ Kekhawatiran atas ancaman keamanan baru yang datang dari seberang lautan, yakni RRC, tampak dalam persepsi negara-negara pesisir kecil. Persaingan di Asia kini dikatakan berlangsung di ruang-ruang maritim, terutama Laut Cina Selatan.⁷⁸

Di kawasan Coral Triangle Initiative (CTI), kepentingan ekonomi dan keamanan energi (*energy security*) RRC juga tersebar, sudah masuk ke Provinsi Papua Barat, tidak hanya di Timor Leste dan Kalimantan. Dalam perkembangan terakhir, perusahaan raksasa RRC, *State Development and Investment Cooperation*, diberitakan akan membangun pabrik semen di Manokwari, wilayah provinsi yang baru dimekarkan itu, pada September 2012. Pabrik semen yang dilengkapi PLTU dan pelabuhan tersebut bisa memenuhi kebutuhan tidak hanya Provinsi Papua Barat, tetapi juga Papua, dan wilayah Indonesia Timur lainnya.⁷⁹ Di Timor Leste, RRC begitu berani menawarkan dan menggelontorkan anggaran negara yang besar bagi pembangunan

⁷³ Dwi Tupani, "Ajang Berburu Peralatan Militer," *Media Indonesia*, 17 Februari 2012.

⁷⁴ "Pertahanan Cina Diperkuat: Anggaran Berganda, Pakai Kas Tambahan untuk Modernisasi Senjata," *Kompas*, 15 Februari 2012: 9, *loc.cit.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Tupani, *loc.cit.*

⁷⁷ Lihat Raju Gopalakrishnan, "Fighters, radar, marine patrols top Asia's military wish-list," *the Jakarta Post*, 17 February, 2012: 12; Ninok Laksono, "Dinamika Asia Pasifik dan Jet Tempur Mutakhir," *Kompas*, 16 Februari 2012.

⁷⁸ Pendapat Andrew Davis, Direktur Program *Australian Strategic Policy Institute*, *ibid.*

⁷⁹ "China Bangun Pabrik Semen di Manokwari," *Kompas*, 26 Maret 2012.

infrastruktur negeri yang baru merdeka tersebut. Dalam konteks (untuk) mengimbangi meluasnya kepentingan RRC di kawasan, apalagi Indonesia Timur, yang membuat kompetisi menguat belakangan inilah, AS menjadi agresif dengan proyek-proyek inisiatif barunya, mulai di Natuna di bagian Utara sampai Timor Leste di Selatan, serta Kalimantan di bagian Barat dan Papua di bagian Timur dari seluruhnya wilayah kerja CTI.⁸⁰

V. Simpulan

Sulit menutupi keterkaitan perkembangan lingkungan strategis di Asia Pasifik dengan peralihan fokus kebijakan militer AS di kawasan. Peralihan fokus ini tidak hanya dipengaruhi eskalasi ketegangan di Laut Cina Selatan, namun juga persepsi kian terancamnya kepentingan AS di Indonesia, negara terbesar di Asia Tenggara yang berdekatan letaknya dengan basis pasukan marinir AS di pangkalan militer Darwin. Banyak pihak tidak bisa mengenyampingkan bahwa tidak jauh dari situ, di Papua, terdapat perusahaan transnasional (*Transnational Corporation* --TNC) AS, Freeport, yang menghasilkan profit tinggi selama bertahun-tahun, tetapi terancam kelanjutan usahanya. Kepentingan TNC AS di bisnis pertambangan yang tersebar di wilayah Indonesia lainnya, yang letaknya tidak jauh dari Australia, juga terancam belakangan akibat maraknya sengketa pertambangan, yang letaknya tidak jauh dari Australia.

Dengan penempatan pasukan marinirnya di Darwin dan manuver kapal-kapal perangnya yang semakin intens, paling tidak AS ingin memperlihatkan kehadiran angkatan perangnya secara nyata dan jelas di kawasan Asia-Pasifik. Bentuk kehadiran secara nyata dan jelas militer AS di kawasan ini tentu saja akan membuat RRC perlu berhati-hati dalam memperlihatkan agresifitas militernya di kawasan, khususnya terhadap negara-negara kecil yang bersandar pada perlindungan AS. Sedangkan kedekatan hubungan Indonesia dengan AS di bawah pemerintahan SBY mempengaruhi sikap pasifnya dalam merespons perkembangan lingkungan strategis, khususnya penempatan pasukan marinir AS di Darwin, Australia, yang tidak jauh letaknya dari (perbatasan terluar) Indonesia.

⁸⁰ Lihat peta Abdul Halim dari Kiara, dalam "Mengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Berdasarkan Konstitusi," makalah presentasi dalam FGD di P3DI Setjen DPRRI, 19 Maret 2012.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Y. Samantho dan Oman Abdurahman *et. al.* *Peradaban Atlantis Nusantara*. Jakarta: Ufuk Press, 2011.
- Barry Buzan, *People, States and Fear: An Agenda fro International Security Studies in the Post-Cold War Era*, New York, Harvester Wheatsheaf, 1991.
- Barry Buzan, Ole Waever, dan Jaap de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, London: Lynne Rienner, 1998.
- Eugene J. Meehan, *The Dynamics of Modern Government*, 1966.
- George Miller. *Indonesia Timur Tempo Doeloe: 1544-1992*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.
- L. David Brown. *Practice-Research Engagement and Civil Society In a Globalizing World*. Washington DC and Massachussets: Civicus and the Hauser Center.
- Liang Liji. *Dari Relasi Upeti ke Mitra Strategis: 2.000 Tahun Perjalanan Hubungan Tiongkok-Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2012.

Makalah

- David L. Ruosseau, Dan Miodownik, dan Deborah Lux Petrone, "Identity and Threat Perception: An Experimental Analysis," paper presented for annual meeting of the American Political Science Association, S.F, California, 2001.
- Edy Prasetyono, "Sistem Keamanan Nasional," makalah penjelasan *Naskah RUU Keamanan Nasional*, 2011.
- _____."Masalah-masalah Bidang Pertahanan Keamanan," Jakarta, CSIS.
- Hasnan Habib, "Globalisasi dan Keamanan Nasional Indonesia," makalah disampaikan kepada Komisi Politik DPA, Jakarta, 28 Januari 2000.
- Juwono Sudarsono, Materi Rapat di Cikeas, Bogor, 11 Februari 2007.

Jurnal

Lean le Roux, "Defining defence requirements: Force design considerations for the South African National Defense Force," *African Security Review*, Vol. 8, No. 5, 1999.

Majalah

"William Cohen: Ingin Memastikan ASEAN Stabil," *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012: 101.

Suratkabar

Ahmad Reza S, "Kemhan Geber Alutsista: Pemerintah diminta memetakan terlebih dahulu potensi ancaman keamanan bangsa," *Republika*, 16 Agustus 2012: 2.

"Amerika Bangun Biro Interogasi di LP," *Media Indonesia*, 15 Februari 2012: 5.

"Amerika Ingin Vietnam Buka Pelabuhannya," *Koran Tempo*, 4 Juni 2012: A14.

"Anggaran Militer US\$ 100 Miliar: Tiongkok Ingin Menangi Perang Lokal", *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2012: 15.

Arif Hulwan, "China Tuding AS Cari Masalah," *Media Indonesia*, 6 Juni 2012: 12.

_____. "AS Berupaya Bendung Pengaruh China di Pasifik," *Media Indonesia*, 2 September 2012: 2.

"AS Tarik 2 Brigade Pasukan dari Eropa," *Kompas*, 14 Januari 2012: 10.

"China Protes Keras AS," *Kompas*, 6 Agustus 2012: 9.

"China Tingkatkan Anggaran Militer," *Media Indonesia*, 5 Maret 2012: 12.

"Didik: Ancaman Ego sektoral di Laut...", *Kompas*, 11 Februari 2012: 4.

Dika Dania Kardi, "Kapal Perang AS Merapat ke Asia Pasifik," *Media Indonesia*, 4 Juni 2012: 4.

"Kapal Siluman Lengkapi TNI AL," *Kompas*, 1 September 2012: 5.

"Dua Korea Kembali 'Panas'", *Kompas*, 21 Februari 2012: 8.

Hakim, Chappy. "Marinir Amerika di Australia," *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.

- “Hillary Clinton Puji Indonesia: China Kecam AS Jangan Ikut Campur dalam Sengketa,” *Kompas*, 5 September 2012: 8.
- “Hindari Konflik Wilayah,” *Republika*, 3 September 2012: 15.
- Julian E. Barnes, “US Heralds Navy’s Shift toward Asia,” *The Wall Street Journal*, June 4, 2012: 1 & 20.
- “Kapal Siluman Lengkapi TNI AL,” *Kompas*, 1 September 2012: 5.
- “Kebijakan Luar Negeri Indonesia,” *Kompas*, 29 Februari 2012: 12.
- Kevin Ruud, “Tomorrow’s Pax pacifica,” *The Jakarta Post*, 13 February 2012: 7.
- “Komitmen AS Masih Dipertanyakan,” *Kompas*, 6 Maret 2012: 9.
- “Kunjungan Hillary Clinton: AS-Indonesia Bahas Laut Cina Selatan dan Kerja Sama Militer,” *Suara Pembaruan*, 3 September 2012: 15.
- “Kunjungan Marinir AS,” *Suara Pembaruan*, 11 Februari 2012: 2.
- “Latma Carat 2102,” *Media Indonesia*, 6 Juni 2012: 6.
- “Marinir Beli Senjata Pertahanan Udara dan BMF-3,” *Koran Tempo*, 16 Mei 2011.
- Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, “Maritime highways of Southeast Asia: Alternative straits?” *The Jakarta Post*, 17 February 2012: 7.
- Ninok Laksono, “Dinamika Asia Pasifik dan Jet Tempur Mutakhir,” *Kompas*, 16 Februari 2012: 8.
- Ninok Leksono, “Tank dan Senjata Penangkalnya,” *Kompas*, 5 September 2012: 15.
- “Pangkalan AS di Darwin Menjaga Keseimbangan,” *Kompas*, 13 Februari 2012: 11.
- “Peran Indonesia Penting di Asia Tenggara,” *Kompas*, 11 Februari 2012: 4.
- “Pertahanan Cina Diperkuat: Anggaran Berganda, Pakai Kas Tambahan untuk Modernisasi Senjata,” *Kompas*, 15 Februari 2012: 9.
- Prayitno Ramelan. “Perseteruan AS dan China di Laut China Selatan,” *Seputar Indonesia*, 22 November 2011.
- Raju Gopalakrishnan, “Fighters, radar, marine patrols top Asia’s militray wish-list,” *The Jakarta Post*, 17 February, 2012: 12.

- “RI Berkepentingan Jaga Keamanan Laut Cina Selatan,” *Suara Pembaruan*, 4 Juni 2012: 3.
- “Sejarah harus Diingat, RSUD Abepura Dibangun Pada Masa Perang Pasifik,” *Papua Pos*, 31 Mei 2012: 4.
- “Super Tucano Perkuat Pertahanan Indonesia,” *Seputar Indonesia*, 2 September 2012.
- “TNI Bangun Pangkalan Kapal Selam,” *Suara Pembaruan*, 13 Agustus 2012: 3.
- “TNI expects stronger navy fleet by 2024,” *The Jakarta Post*, 30 August 2012: 4.
- “TNI AL Mendapatkan 14 Kapal Baru,” *Kompas*, 17 Februari 2012: 5.
- “TNI AL Tangkap Dua Kapal di Arafura,” *Suara Pembaruan*, 5 Maret 2012: 14.
- Whaley, Floyd. “Bases are gone, but US presence is felt in Philippines,” *International Herald Tribune*, 30 April 2012: 1.
- “William S. Cohen: Ingin Memastikan AS Stabil,” *Majalah Tempo*, 22 Januari 2012: 101.
- “95% Cadangan Emas Freeport Ada di Papua,” *Suara Pembaruan*, 7 Maret 2012: 10.

Portal

- “AS di Australia Bukan Ancaman bagi ASEAN,” 16 November 2012, <http://us.vivanews.com/news/read/264838-as-di-australia-buka...> diakses 11 Januari 2012.
- “AS Gelar Pasukan Marinir Permanen di Darwin,” *Kompas.com*, 11 November 2011, diakses 11 Januari 2012.
- “AS Fokus pada Kekuatan Militer Asia,” *Kompas.com*, 18 November 2011, diakses 11 Januari 2012.
- “China: Itu Bukti Mentalitas Perang Dingin,” *Kompas.com*, 30 November 2011, diakses 11 Januari 2012.
- David Raja Marpaung, “Ancaman Pangkalan AS di USA di Darwin, Australia,” <http://www.Indonesiadefense-ana-lysis.blogspot.com/2011/11/ancaman-pangk...>, diakses 11 Januari 2011.

- Eddy Maszudi, "Segitiga RI, Timtim, dan Australia," <http://www.eastasiastudy.blogspot.com/2005/09/diplomasi-indonesiaaustralia...>, diakses 30 Januari 2012.
- "Geostrategi Indonesia," <http://www.blogspot.com/2010/02/geostrategi-indonesia.html>, 25 Februari 2010, diakses pada 30 Januari 2012.
- "Geopolitik," <http://www.scribd.com/doc/38166184/Pengertian-Geopolitik>, diakses pada 30 Januari 2012, diakses pada 30 Januari 2012.
- "Indonesia sebagai Negara Kepulauan," <http://www.scribd.com/doc/38166184/Pengertian>, 30 Januari 2012, diakses pada 30 Januari 2012..
- "Melintas Wilayah Tanpa Izin, Pilot AS Ditahan di Balikpapan." *Suara Pembaruan.com*, 2 Oktober 2012, diakses pada 2 Oktober 2012.
- "Obama ke Australia Bahas Isu Keamanan," *Vivanews*, 16 November 2011, diakses 11 Januari. 2011.
- Prayitno Ramelan. "Marinir AS di Australia dan 70 Pasukan AS di Papua, Sebuah Ulasan," <http://www.hankam.kom-pasiana.com/2011/11/30/marinir-as-di-australia-da>, diakses 11 Januari 2011.
- Ramadhian Fadillah, "Boediono: Tambahan Marinir AS di Darwin Bukan Ancaman," *DetikNews*, 7 Desember 2012, diakses 11 Januari 2011.
- Rita Uli Hutapea. "Wow! 2.500 Marinir AS Akan Ditempatkan di Australia," *detikNews*, 16 November 2011, diakses pada 11 Januari 2012.
- Scot A. Marciel. "New Thinking for a New Partnership." *USINDO@USINDO.org*, diakses 23 Mai 2012.
- Teddy Rumengan. "TNI AU Tahan Pilot Ambon." *Jumas.com*, 2 Oktober 2012, diakses pada 2 Oktober 2012.

